



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S. Nomor 003 Palangka Raya 73111
Telepon / Fac : 0536 3241036, Website <https://kesbangpol.kalteng.go.id/>

Laporan Layanan Informasi Publik
Tahun 2023

Palangka Raya, Januari 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023. Laporan ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pelayanan Informasi kepada publik oleh PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang Tahun 2023. Laporan ini memuat gambaran umum kebijakan pengelolaan, pelaksanaan, hingga rekomendasi tindak lanjut pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil Kolaborasi dengan berbagai pihak hingga menghasilkan inovasi-inovasi Pelayanan Informasi Publik, telah mengiringi langkah kami melaksanakan amanah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 berhasil meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi menjadi Cukup Informatif dibandingkan tahun sebelumnya Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi belum menjadi Badan Publik yang aktif menyediakan informasi publik. Sebagai PPID Pelaksana kami berkomitmen juga untuk terus berinovasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik khususnya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi ini kami susun. Harapan kami semoga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik untuk menuju Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang Informatif.

Palangka Raya, Januari 2024

Ketua PPID Pelaksana

ttd

FAJAR SRININGSIH, S.Sos, M.Si

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri utama negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (Good Governance). Tak hanya itu, informasi publik juga memainkan peranan yang penting bagi pengembangan pengetahuan dan kesejahteraan warga.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PP tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan dan akses informasi sekaligus mendorong komitmen yang kuat antara para pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Terkait dengan komitmen tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah mengeluarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/064/Bid.I/Diskominfo Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Laporan Tahunan Layanan Informasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah adalah Sebagai bahan bagi pengelolaan informasi publik dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sedang tujuan dari Laporan Tahunan Layanan Informasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Membantu PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyediakan, mengumpulkan, dan mendokumentasikan serta menyampaikan informasi publik

- tentang kegiatan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
 3. Mendorong terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam melaksanakan Layanan Informasi Publik sebagai berikut :

1. Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008;
2. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/064/Bid.I/Diskominfo Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sistematika Laporan

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang layanan informasi publik, maksud dan tujuan serta landasan hukum yang mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik tersebut.

Bab II. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum yang memuat struktur organisasi, tugas dan mekanisme PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan jadwal pelayanan informasi publik.

Bab III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum yang memuat sarana dan prasarana pelayanan, sumber daya manusia yang menangani, serta pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta laporan penggunaannya.

Bab IV. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Bab ini menjelaskan tentang jumlah permohonan informasi publik yang diterima PPID Pelaksana, waktu penyelesaian yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya serta jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya.

Bab V. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Bab ini memuat tentang jumlah keberatan yang diterima, tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya, jumlah permohonan penyelesaian sengketa dan informasi serta hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi komisi informasi.

Bab VI. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Bab ini menjelaskan tentang kendala internal dan eksternal yang terjadi pada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan layanan Informasi dan Dokumentasi.

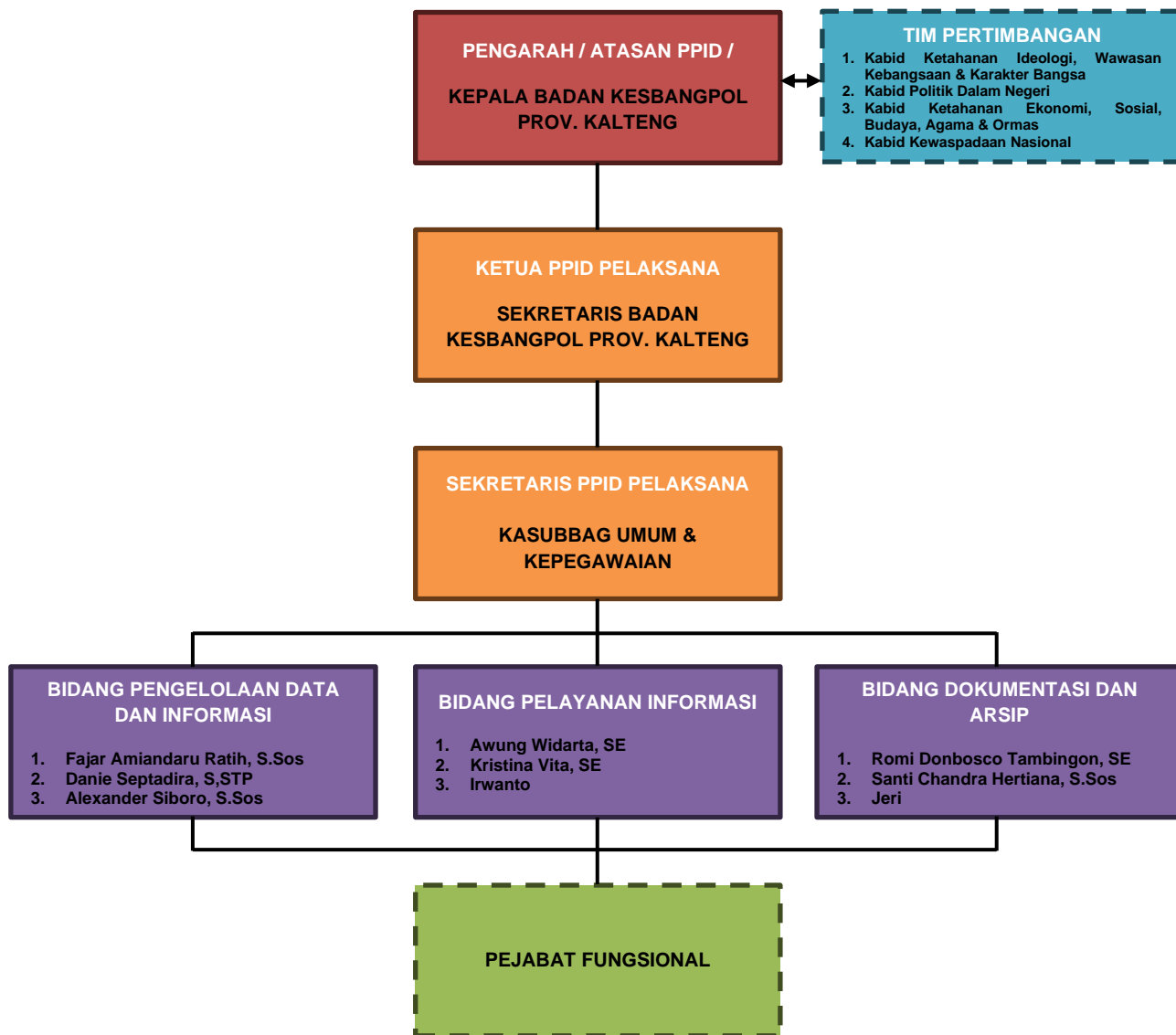
Bab VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana rekomendasi serta rencana tindak lanjut PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana



B. Tugas Dan Fungsi PPID Pelaksana

Adapun tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai PPID Pelaksana yaitu :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bagian-bagian;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
5. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Fungsi dari PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai PPID Pelaksana adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan informasi;
2. Dokumentasi arsip;
3. Pelayanan informasi; dan
4. Pelayanan dan penyelesaian sengketa.

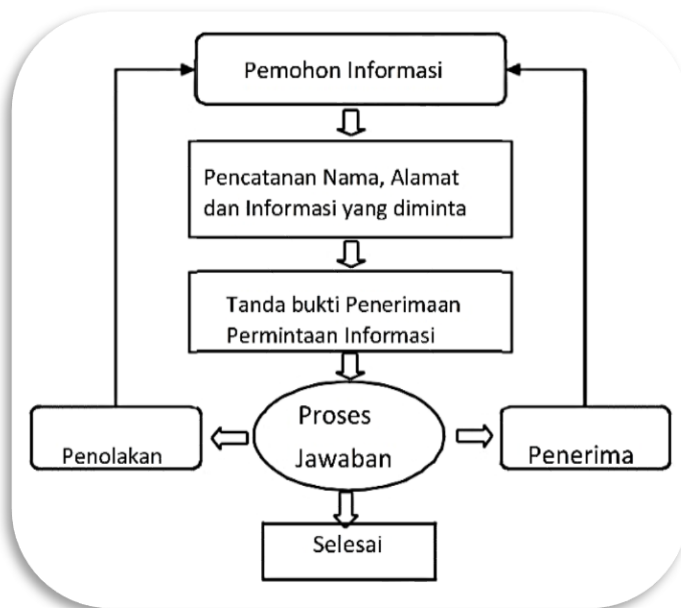
C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah memberikan layanan langsung melalui desk layanan informasi publik. Informasi Publik Website melalui PPID Utama : <http://www.ppid.kalteng.go.id/> atau website : <https://kesbangpol.kalteng.go.id/>

Mekanisme Permohonan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy, KTP pemohon dan pengguna informasi;
2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik (IP) kepada Pemohon IP
3. Petugas memproses permintaan pemohon IP sesuai dengan formulir permintaan IP yang telah ditandatangani oleh pemohon IP;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon / pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID Pembantu menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna IP

Alur Permohonan Informasi Publik



Prosedur pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah :

No	Kegiatan	Pelaksana		
		Desk Layanan	Bidang Pelayanan IP	PPID
1.	Menerima Permintaan Informasi Publik (IP)	Mulai		
2.	Melaporkan kepada penanggung jawab			
3.	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan IP			
4.	Menginformasikan ke desk			
5.	untuk memproses lebih lanjut Menghubungi Pemohon IP			
6.	Melaporkan kepada pimpinan			
				Selesai

D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Layanan permohonan informasi pada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

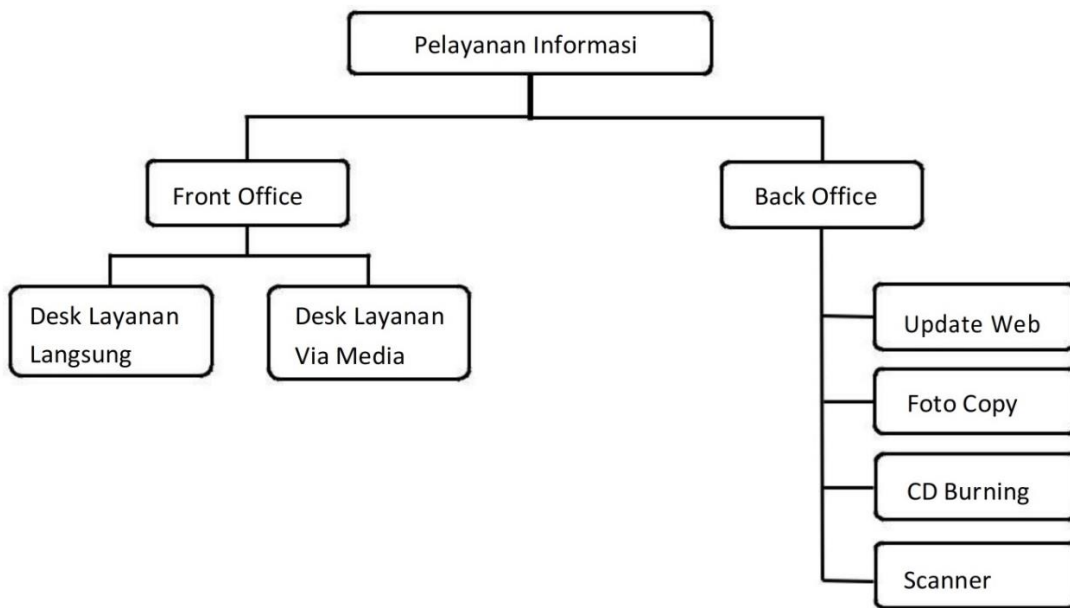
1. Senin - Kamis

- a. Jam Layanan : 09.00 WIB - 15.00 WIB
- b. Istirahat : 12.00 WIB - 13.00 WIB

2. Jumat

- a. Jam Layanan : 09.00 WIB - 15.00 WIB
- b. Istirahat : 11.00 WIB - 13.00 WIB

Operasional pelayanan Informasi Publik informasi publik pada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah :



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Untuk mengakomodasi permohonan Informasi Publik secara tatap muka, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan desk layanan Informasi. Prasarana yang tersedia di Desk Layanan Informasi antara lain:

- Meja layanan informasi
- Sofa
- Komputer
- Printer All In One
- Formulir-formulir terkait layanan informasi.

Selain Desk Informasi tersebut, juga disediakan 2 ruangan konsultasi yang dapat digunakan untuk melayani para pemohon informasi publik.



Meja Layanan PPID Badan Kesbangpol



Ruang Layanan 1



Ruang Layanan 2

B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Beserta Kualifikasinya

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/064/Bid.I/Diskominfo Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sumber daya manusia yang bertugas untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, berjumlah 11 orang yang terdiri dari :

1. 1 orang Ketua PPID Pelaksana dijabat oleh Fajar Sriningsih, S.Sos, M.Si (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah).

2. 1 orang sekretaris PPID Pelaksana dijabat oleh Rusmawineta, S.E (Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah)
3. Bidang Pengelolaan Data Dan Informasi, dikelola oleh :
 - Fajar Amiandaru Ratih, S.Sos (Analisis Kepegawaian)
 - Danie Septadira, S.STP (Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana)
 - Alexander Siboro, S.Sos (Penyusun Usulan Rencana Anggaran)
4. Bidang Pelayanan Informasi, dikelola oleh :
 - Awung Widarta, S.E (Penyusun Program Kerja Evaluasi dan Laporan)
 - Kristina Vita, S.E (Bendahara Pengeluaran)
 - Irwanto (Pengadministrasi Surat)
5. Bidang Dokumentasi Dan Arsip, dikelola oleh :
 - Romi Donbosco Tambingon, S.E (Kasubbag Keuangan)
 - Santi Chandra Hertiana.S.Sos (Pengolah data Keuangan)
 - Jeri (Pengelola Program Dan Kegiatan / Pengurus Barang)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana tersebut juga didukung oleh seluruh ASN yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Serta Laporan Penggunaannya

Sesuai dengan maklumat pelayanan informasi publik serta profil layanan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan informasi publik dalam bentuk soft file secara gratis (tidak dipungut biaya) yang dapat diakses secara bebas di website PPID Utama maupun website PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal diperlukan penggandaan informasi, jika kurang dari 10 (sepuluh) lembar maka biaya penggandaan dibebankan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai termohon informasi. Jika lebih dari 10 (sepuluh) lembar maka biaya penggandaan dibebankan kepada Pemohon Informasi.

Adapun anggaran operasional maupun anggaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah dianggarkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 permohonan informasi yang masuk melalui PPID Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melalui desk layanan informasi/offline berjumlah 7 pemohon.

B. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik Dengan Klasifikasi Tertentu dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung maupun melalui email.

C. Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Permohonan informasi yang masuk sepanjang tahun 2023 melalui PPID Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melalui desk layanan informasi berjumlah 7 pemohon seluruhnya dikabulkan.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Tidak ada permohonan informasi yang ditolak (Nihil)

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan pelayanan dalam keterbukaan informasi publik, sehingga sampai saat ini pemohon informasi publik tidak mengajukan keberatan atas penolakan permintaan informasi publik (Nihil).

B. Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya

Tidak ada (Nihil)

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Tidak ada (Nihil)

D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Tidak ada (Nihil)

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kendala Internal

Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi di Kalimantan Tengah. Sehingga Kami sepenuhnya menyadari bahwa kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik masih perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan agar nantinya sampai pada tujuan Informatif. Dalam perjalanannya, pelayanan informasi kepada publik sering terhambat disebabkan oleh :

1. Belum maksimalnya pengelolaan informasi publik dan kurangnya kesadaran ASN Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dalam memberikan informasi yang diminta oleh pemohon.
2. Sumber Daya Manusia yang menjadi PPID Pelaksana memiliki tugas dan fungsi utama, sehingga fokus dalam memberikan layanan informasi belum optimal.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang dimiliki.
4. Website Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah baru dibuat pada tahun 2023 dan masih kurang informatif.
5. Belum ada pejabat fungsional tertentu di bidang kearsipan, dokumentasi dan kehumasan.
6. Belum ada pejabat fungsional di bidang teknologi informasi.

B. Kendala Eksternal

Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, kendala eksternal yang sering terjadi adalah :

1. Pemohon informasi yang berasal dari kalangan masyarakat umum dalam meminta informasi publik kurang memahami tugas pokok dan fungsi dari PPID.
2. Pemohon meminta data/informasi yang tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana.
3. Pemohon tidak tahu atau kurang memahami prosedur permohonan informasi publik.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan kendala eksternal dan internal tersebut diatas, kami merumuskan sejumlah rekomendasi sebagai berikut :

1. Menyusun formasi Pejabat Fungsional Pranata Kehumasan, Komputer dan Arsiparis serta menerima mutasi PNS jabatan dimaksud untuk melaksanakan tugas sebagai pengelola PPID.
2. Kaderisasi pengelola PPID kepada staf sehingga transfer of knowledge dapat berjalan dengan baik.
3. Rapat koordinasi berkala dengan agenda kegiatan yang beragam, misalnya workshop, Training of Trainers (ToT), Diklat, Seminar, Bimbingan Teknis (Bimtek) dan lain sebagainya.
4. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
5. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No. 14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No. 14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.
6. Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID yang terintegrasi
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang PPID serta tugas dan fungsinya.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT / UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
1	Kedudukan, domisili dan alamat lengkap	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Foto Kantor dan alamat lengkap Kantor	12 bulan
2	Struktur organisasi, gamprofil singkat pejabat	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Struktur dan Profil Singkat Pejabat, Gambaran Umum PD	12 bulan
3	Visi dan misi Gubernur	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Visi dan misi Gubernur	12 bulan
4	Tugas pokok dan fungsi	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Tugas pokok dan fungsi	12 bulan
5	LHKPN yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke Badan Publik untuk diumumkan	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	LHKPN yang telah diverifikasi KPK	12 bulan
6	Nama program dan kegiatan	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Daftar program dan kegiatan	12 bulan
7	Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta no. Telepon dan/alamat yang dapat dihubungi	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	SK PPTK	12 bulan
8	Target dan/atau capaian program kegiatan	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Perjanjian Kinerja	12 bulan
9	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	12 bulan
10	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Ringkasan DPA	12 bulan
11	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Daftar agenda penting	12 bulan
12	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Informasi terkait tupoksi Perangkat Daerah terkait dengan hak-hak masyarakat	12 bulan
13	Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara	12 bulan
14	Informasi tentang penerimaan calon peserta didik	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Informasi tentang penerimaan calon peserta didik	12 bulan
15	Ringkasan linformasi tentang kinerja Badan Publik, berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah dilaksanakn	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Laporan Realisasi Anggaran (TEPRA) per triwulan, LAKIP	12 bulan
16	Rencana dan realisasi anggaran	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	LRA	12 bulan
17	Neraca	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Neraca	12 bulan

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT / UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
18	Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	LAK	12 bulan
19	Daftar aset dan inventasi	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Daftar Aset	12 bulan
20	Ringkasan Laporan akses informasi Publik	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Laporan dan Prosedur Akses Informasi Publik	12 bulan
21	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yg mengikat dan/atau berdampak bagi publik yg dikeluarkan oleh Badan Publik	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Daftar Peraturan PerUU, Keputusan, dan/atau kebijakan yg telah disahkan atau ditetapkan	12 bulan
22	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	SOP Layanan Informasi, SOP Tata Cara Pengajuan Keberatan dan SOP Penyelesaian Sengketa	12 bulan
23	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yg dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik yg bersangkutan	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	SOP Pengaduan Penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	12 bulan
24	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dgn peraturan perundang-undangan	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa (siapbajasa)	12 bulan
25	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	SOP tentang prosedur evakuasi keadaan darurat di OPD	12 bulan
26	Daftar Informasi Publik (DIP)	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Daftar Informasi Publik	12 bulan
27	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Daftar Peraturan, Keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik, beserta dokumen pendukung	12 bulan
28	Pedoman pengelolaan informasi, administrasi personil dan keuangan	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	SOP Pengelolaan Informasi, SOP administrasi, SOP keuangan	12 bulan
29	Profil pimpinan dan pegawai yg meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yg pernah diterima	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Profil pegawai, DUK	12 bulan
30	Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangan	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Ringkasan DPA	12 bulan
31	Data statistik yg dibuat dan dikelola oleh Badan Publik	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Data statistik yg dibuat oleh OPD, cth statistik keuangan, kepegawaian, perkebunan, kehutanan, dll	12 bulan

NO.	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT / UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
32	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Surat-surat perjanjian kerjasama, SPK, dll	12 bulan
33	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Registrasi surat menyurat OPD	12 bulan
34	Syarat-syarat perizinan, izin yg diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yg diberikan	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Syarat-syarat perijinan, Daftar izin yg telah diterbitkan beserta dokumen pendukungnya	12 bulan
35	Data perbendaharaan atau inventaris	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Data inventaris	12 bulan
36	Rencana strategis dan rencana kerja Badan Politik	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Renstra dan Renja OPD	12 bulan
37	Agenda kerja pimpinan satuan kerja	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Agenda kerja pimpinan OPD	12 bulan
38	Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yg dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yg dimiliki beserta	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Laporan Tahunan, Daftar Sarana dan Prasarana informasi, SK PPID, Anggaran, dll	12 bulan
39	Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yg ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Daftar jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yg ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya	12 bulan
40	Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yg dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Daftar jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yg dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya	12 bulan
41	Daftar serta hasil-hasil penelitian yg dilakukan	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	Daftar serta hasil-hasil penelitian yg dilakukan	12 bulan
42	Informasi publik lain yg telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	sda	12 bulan
43	Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 bagi Badan Publik yg memberikan izin dan/atau melakukan	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	sda	12 bulan
44	Informasi dan kebijakan yg disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum	Sekretariat	Bidang Data & Infomasi	Palangka Raya	sda	12 bulan

**AGENDA TAHUNAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**

NO.	TANGGAL / BULAN	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Febuari, Maret, Juni, September, November 2024	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Penyusunan Renja , Penyusunan Renja Perubahan
2.	Juni, September 2024	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA6 SKPD	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Rencana Kerja Anggaran
3.	Oktober 2024	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA6 SKPD	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	RKA Perubahan
4.	Febuari 2024	Koordinasi dan Penyusunan DPA6 SKPD	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA
5.	Oktober 2024	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA6 SKPD	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran DPA
6.	Januari, Febuari, April, Juli, September, Oktober, November, Desember2024	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Penyusunan LAKIP, Penyusunan Laporan TEPR, Penyusunan LPPD dan LKPJ
7.	Febuari, April, Juli, Agustus, Oktober 2024	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Teknis Program Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	Januari, April, Juli, Oktober 2024	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.	Januari, April, Juli, Oktober 2024	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengguna Anggaran PA, PPTK, Alat Tulis Kantor
10.	Oktober 2024	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
11.	Desember 2024	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
12.	Oktober 2024	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
13.	Juni, Desember 2024	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester
14.	Febuari 2024	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Asuransi Barang Milik Daerah

NO.	TANGGAL / BULAN	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN
15.	Febuari, April, Juli, Oktober 2024	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Penatausahaan Barang Milik Daerah
16.	April 2024	Peningkatan Sarana dan Prsasana Disiplin Pegawai	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Sarana Prasarana Disiplin Pegawai
17.	April 2024	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Seragam hitam putih, Seragam PDH, Seragam KORPRI
18.	Maret 2024	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Administrasi Kepegawaian
19.	Maret 2024	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Pelatihan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai SKP
20.	Januari, April, Juli, Oktober 2024	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Alat listrik kantor
21.	Januari, April, Juli, Oktober 2024	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Alat Tulis Kantor
22.	Januari, April, Juli, Oktober 2024	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Penyediaan Cetak dan Penggandaan,
23.	Januari, April, Juli, Oktober 2024	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Belanja Surat Kabar
24.	Januari, Maret, Juli, Oktober 2024	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Rapat Koordinasi Jajaran Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota Se Kalteng, Kalteng Expo 2024, Pawai Hut Provinsi Kalimantan Tengah, Pawai Idul Adha, Pawai Idul Fitri, Perahu Hias Pawai HUT Kalteng Tahun 2024
25.	Januari 2024	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Kendaraan Operasional
26.	April 2024	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Bendera, umbul-umbul, telisir, Stand Microphone Tripod), CCTV 5 MP, TV Monitor Ruang VCON, Meja kerja pejabat eselon III, Kursi kerja pejabat eselon III, Pengadaan audio system di persimpangan lalu lintas, Pengadaan speaker portable, Pengadaan Proyektor, Microphone video camera and DSLR, Pengadaan Kamera, Pengadaan webcam, Pengadaan personal computer, Pengadaan laptop, Pengadaan Printer
27.	Januari, April, Juli 2024	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Belanja Surat Menyurat
28.	Januari, April, Juli, Oktober 2024	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Tagihan Listrik, Tagihan Internet

NO.	TANGGAL / BULAN	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN
29.	Januari, April, Juli, Oktober, Desember 2024	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Alat dan Bahan Kebersihan Kantor, Peralatan makan minum / Pecah belah, PPID Pelaksana, Penyusun Berita Dan Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Sopir, Belanja luran Jaminan Kesehatan Pegawai Non ASN, luran BPJS ketenagakerjaan, Alat dan Bahan Kebersihan Kantor, Titip Dana Honor Tekon, alat kebersihan dll
30.	Januari, April, Juli, Oktober 2024	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas, Penyediaan Biaya Pajak Kendaraan Dinas Operasional, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
31.	Januari, April, Juli, Oktober 2024	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Perencanaan peningkatan jalan, halaman dan parit keliling kantor, Perencanaan renovasi pagar kantor, Perencanaan renovasi parkir motor, Perencanaan renovasi pos jaga, Pengawasan pengecoran jalan, halaman dan parit keliling kantor, Pengawasan renovasi pagar kantor, Pengawasan renovasi parkir motor, Pengawasan renovasi pos jaga, Pemeliharaan, Renovasi pos jaga, Renovasi parkir motor, Renovasi pagar kantor, Peningkatan jalan, halaman dan parit keliling kantor
32.	Januari, April, Juli, Oktober 2024	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Pemeliharaan inventaris kantor
33.	Januari, April, Juli, Oktober 2024	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Pemeliharaan Alat Kantor
34.	Febuari, April, Mei, Juli, Oktober 2024	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	ATK Perlengkapan Penyusunan Program Kerja Bidang Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
35.	Febuari, April, Mei, Juli, Oktober 2024	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Sekretariat FPK Prov. Kalteng, Sosialisasi FPK Prov. Kalteng, Rapat Kerja, Pertemuan, Jamuan Tamu, Seragam Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah, Dewan Pembina FPK Prov. Kalteng Wagub, Kapolda, Danrem, Kaban Kesbangpol, Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan FPK Provinsi Kalimantan Tengah
36.	Juli, September, Oktober 2024	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Cerdas Harati Pancasila, Peringatan HSP dan IKBAB Prov. Kalteng
37.	April, Juli, Oktober 2024	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Sosialisasi Perda Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Perjalanan Dinas

NO.	TANGGAL / BULAN	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN
		Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
38.	Febuari, April, Juli 2024	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
39.	Febuari, Mei, Oktober 2024	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Hari Lahir Pancasila, Peringatan Hari Bela Negara HBN, Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara
40.	April 2024	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila
41.	Oktober 2024	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Lomba Regu Pengibar Bendera
42.	Juli 2024	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Pusdiklat Paskibraka pada HUT RI
43.	April 2024	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Pengarusutamaan Nilai Pancasila di Masyarakat
44.	Juli 2024	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Studi Lintas Nusantara, Studi Lintas Nusantara
45.	April 2024	Pembentukan Paskibraka	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
46.	Januari, Febuari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, Desember 2024	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Indeks Demokrasi Indonesia
47.	Febuari, Maret, April, Junu, Juli 2024	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Pendidikan Politik untuk Perempuan/Sarasehan

NO.	TANGGAL / BULAN	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN
		Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
48.	Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober 2024	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Legislatif untuk 1 Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pendidikan Politik Kebangsaan 2 Kab/Kota, Pendidikan Politik Perempuan, Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Legislatif Tahun 2024 untuk 1 Kabupaten/Kota, Pendidikan Politik Kebangsaan, Pendidikan Politik Perempuan dan Kegiatan dengan legislative, Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Legislatif Tahun 2024
49.	Februari, Maret, April 2024	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Forum Diskusi Politik, Forum Diskusi Politik/Sosialisasi Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan, Penyerahan dan Penyaluran Dana Hibah Banpol, Tim Penilai dan Evaluasi Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024, Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Parpol Provinsi Kalimantan Tengah, Barsel, Bartim, Barut, Jakarta, Kapuas, Katingan, Kotim, Pulpis, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Dana Hibah KPU, Korem Panju Panjung, Polda Kalteng, Bantuan Keuangan Partai Politik
50.	Januari, Februari, April, Juli, Agustus 2024	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Suara Kalteng Berkah Tahun 2024, Pendukung Kegiatan Real Count Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Tim Sistem Informasi Pemantauan Daerah SIPANTAU, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Situasi Politik Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Perjalanan Dinas SIPANTAU
51.	Februari 2024	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Sosialisasi Ormas, Direktori Ormas/Laporan Ormas, dll
52.	Mei, Juli, Agustus 2024	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	FGD Ormas, FGD / Rapat Timdu Ormas
53.	Mei, Juli, Agustus 2024	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Ormas, Makan Minum Peserta, Panitia, Narasumber, Moderator, Pendukung Kegiatan Lainnya, dll

NO.	TANGGAL / BULAN	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN
54.	Maret, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 2024	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Dialog/Silaturahmi Ormas/Tomas/Toga/Todat, Direktori Ormas, Dialog / Silaturahmi Ormas Dan Untuk Rapat Tim Peneliti Ormas / DII, Tim Peneliti / Pendataan Ormas
55.	Maret, Juni, Agustus, September, Oktober 2024	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Monitoring, evaluasi dan pelaporan ormas
56.	Febuari, April, Mei, Juli 2024	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Karya Bakti Komunitas Asn Anti Narkotika, FGD / Rakor Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, P4gn
57.	Febuari, Maret, April 2024	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Sosialisasi Ketahanan Ekonomi / Sistem Informasi Indeks Ketahanan Ekonomi
58.	Maret, Juni, Juli, Agustus, Oktober 2024	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Silaturahmi /Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama, Backup Data Elektronik (Data Ormas Dan Ekososbud), Hibah Fkub
59.	Mei, Juli, Agustus 2024	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Huma Betang Goes To Campus
60.	Maret, April, Juli 2024	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Tim Monev Ekososbudagama
61.	Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober 2024	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Konflik

NO.	TANGGAL / BULAN	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TEMPAT KEGIATAN	KETERANGAN
		Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
62.	Maret, April, Juli, Oktober 2024	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Fasilitasi FKDM Provinsi
63.	Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 2024	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Kegiatan Penanganan Konflik Sosial, Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Ekstremisme /Terorisme
64.	Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2024	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Bimbingan Teknis Deteksi Dini dan Cegah Dini, Kegiatan Pencegahan Ekstremisme, Radikalisme, Terorisme bekerjasama dengan Mitra, Rapat/ Pertemuan dalam rangka Kerjasama Intelijen, Tim Aplikasi Indeks Kerawanan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, Kegiatan Monitoring Kesbangpol dan Mitra Kesbangpol
65.	Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 2024	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Kegiatan Monitoring/Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Kondisi Daerah, Tim Poa Prov. Kalteng, Puskominfo Prov. Kalteng, Sekretariat Tim POA.
66.	Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 2024	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Bidang	Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Palangka Raya	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah